

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jl. A. YANI No. 78 (0526) 2091134 Tamiang Layang 73611</p>	Nomor SOP	: 600/26/DPUPRPERKIM/TR/XI/2024
	Tanggal Pembuatan	: 15 Januari 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Pengesahan	: 22 Januari 2024
Pengesahan	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Yumail J. Paladuk, ST.,MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690514 199803 1 010	
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI KKPR/PKKPR		
Definisi: Rekomendasi kesesuaian tata ruang adalah rekomendasi tentang kesesuaian tata ruang yang mengacu pada rencana tata ruang, digunakan sebagai salah satu persyaratan wajib perizinan pemanfaatan ruang yang di terbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang dengan masa berlaku sesuai dengan masa berlakunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.		
Nomor	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1. Pendidikan Minimal S1/Sederajat
2	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	2. Memahami Tentang RTRW Kabupaten Barito Timur
3	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	3. Dapat Mengoperasikan Komputer
4	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 - 2034	
Pihak - Pihak Terkait		Peralatan/Perlengkapan:
1. FPRD Kabupaten Barito Timur; 2. Sekretariat/ Pokja FPRD Kabupaten Barito Timur; 3. Pemohon Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) 5. Badan Pertanahan Nasional (BPN)		1. Lemari Arsip; 2. Blangko Permohonan; 3. Komputer; 4. Meja Pelayanan; 5. Buku Register Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang; 6. Buku Register Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. 7. Printer
Peringatan		Pencatatan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada sistem administrasi rekomendasi kesesuaian tata ruang.		1. Setiap permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang tercatat dalam Buku Register Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. 2. Setiap penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang tercatat dalam Buku Register Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.

URAIAN PROSEDUR REKOMENDASI KKPR/PKKPR

No	Aktivitas	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat/Pokja/FP RD	DPMPTSP	BPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas Front Office Teknis melalui loket layanan PTSP dan/atau secara online.	MULAI				1. Surat Pengantar; 2. Surat Permohonan; 3. Rencana usaha atau proposal rencana usaha; 4. Lampiran Peta; 5. Lokasi Usaha berupa alamat administratif dan Data Spasial berupa Koordinat/Data Shp; 6. Kebutuhan Luas Lahan; 7. Informasi Penguasaan Tanah; 8. Contact Person Pemohon; 9. Nomor Induk Berusaha (NIB). 10. Rencana Induk Kawasan (RIK); 11. Rencana Teknis Bangunan (RTB);	1 Hari	Berkas Lengkap	Proses Online
2	Petugas Front Office teknis melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila lengkap dan benar maka berkas diterima dan selanjutnya memberi tanda terima kepada pemohon.	Tidak		Ya PROSES		Berkas Lengkap	1 Hari	Berkas yang Telah diverifikasi	Proses Online
3	Sistem menerbitkan surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)		PROSES	Lengkap		Berkas yang Telah diverifikasi	1 Hari	Bukti Pembayaran PNBPN	Proses Online
4	Proses Persetujuan KKPR				PROSES	Bukti Pembayaran PNBPN	10 Hari	Pertek Pertanahan	Proses Online
5	Pokja FPRD membuat nota dinas terkait permohonan yang diajukan disertai Draft Rekomendasi PKKPR dan melakukan cek lapangan sebagai dasar rekomendasi.		PROSES			1. Pertek Pertanahan 2. Peta RTRW 3. Peta RDTR	3 Hari	1. Berita Acara Verifikasi Lapangan 2. Berita Acara Pokja FPRD 3. Draft Rekomendasi PKKPR 4. Peta Kesesuaian Pola Ruang dan Struktur Ruang	Proses Offline
6	Penilaian usulan dokumen oleh Forum Penataan Ruang		PROSES			1. Berita Acara Verifikasi Lapangan 2. Berita Acara Pokja FPRD 3. Draft Rekomendasi PKKPR 4. Peta Kesesuaian Pola Ruang dan Struktur Ruang	3 Hari	Rekomendasi PKKPR	Proses Offline
7	Pertimbangan teknis disampaikan ke DPMPTSP untuk proses pembuatan surat izin/ pemenuhan persyaratan oleh petugas Back Office teknis.			SELESAI		1. Bukti Pembayaran PNBPN 2. Pertek Pertanahan 3. Berita Acara Verifikasi Lapangan 4. Berita Acara Pokja FPRD 5. Draft Rekomendasi PKKPR 6. Peta Kesesuaian Pola Ruang dan Struktur Ruang 7. Rekomendasi PKKPR	1 Hari	Persetujuan Penebitan PKKPR/KKPR	Proses Online/Offline
						Jumlah	20 Hari		